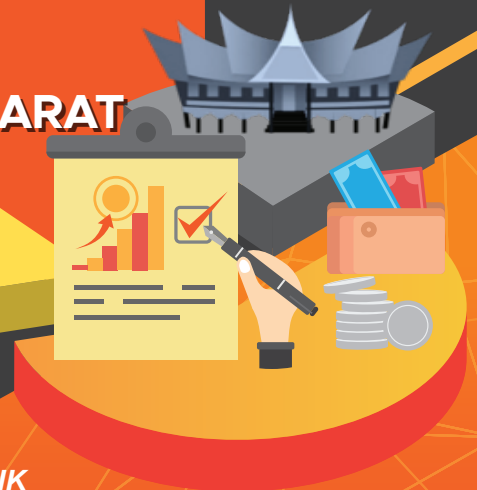




Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI SUMATERA BARAT





Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI SUMATERA BARAT



<https://www.srb.go.id>

**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: 978-602-6544-46-9
No. Publikasi: 13560.1805
No. Katalog: 9102067.13

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: viii + 36 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Sumatera Barat

Penyunting: Bidang IPDS BPS Provinsi Sumatera Barat

Desain Kover oleh: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik, BPS

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tata Letak: Bidang IPDS BPS Provinsi Sumatera Barat

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dicetak oleh: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

<https://sumbar.bps.go.id>

Tim Penyusun

Pengarah

Dr.Ir.Sukardi, M.Si

Penanggungjawab

Ichsan, SST

Teguh Sugiyarto, M.Pop.Hum.Res, Ph.D.

Hefinanur SE, M.E

Editor

Nilham, SE

Lidya Sri Yeni, SST, M.Si

Dewi Astuti, SST, M.Stat.

Penulis

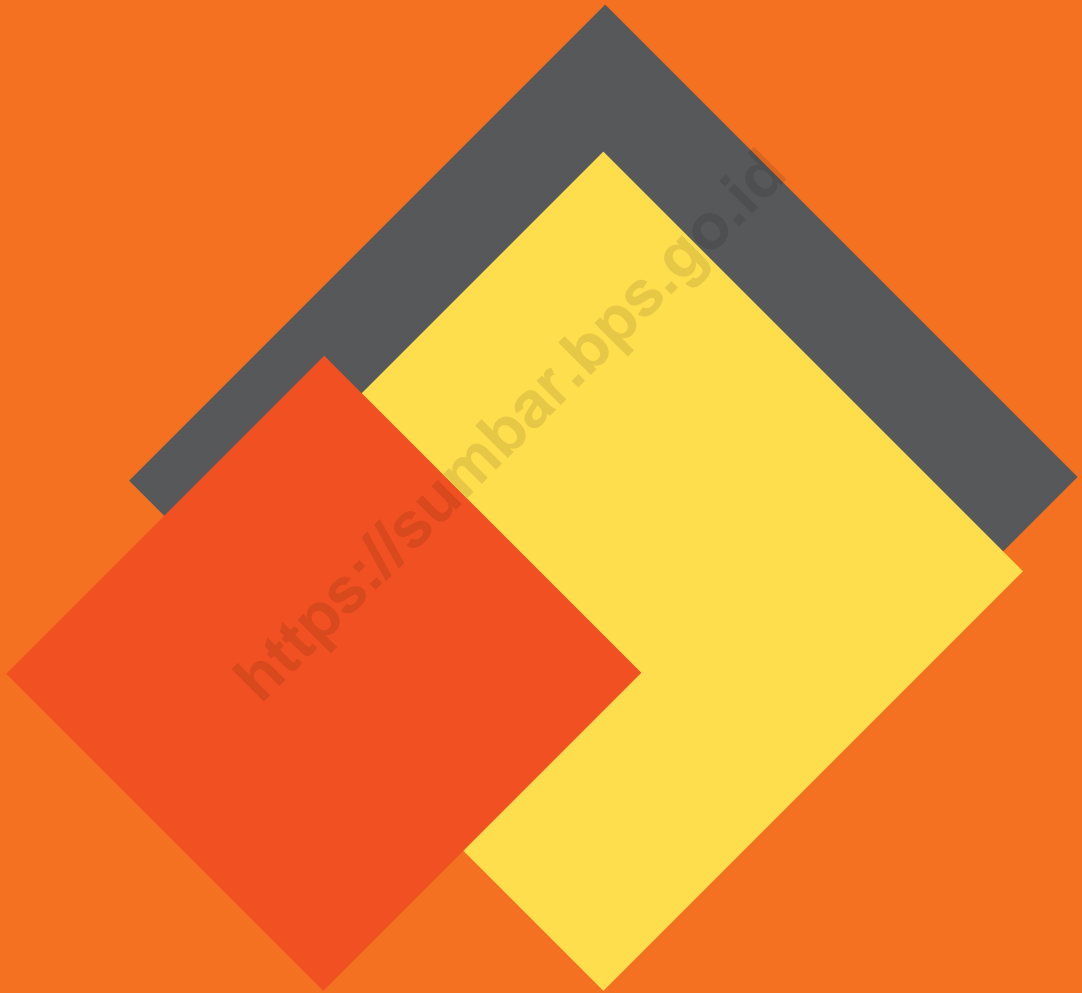
Eri Mardison, S.Si, MA

Desain dan *Layout*

Lidya Sri Yeni, SST, M.Si

Kontributor Data

Sekretariat SE2016



<https://sumbar.bps.go.id>

Kata Pengantar



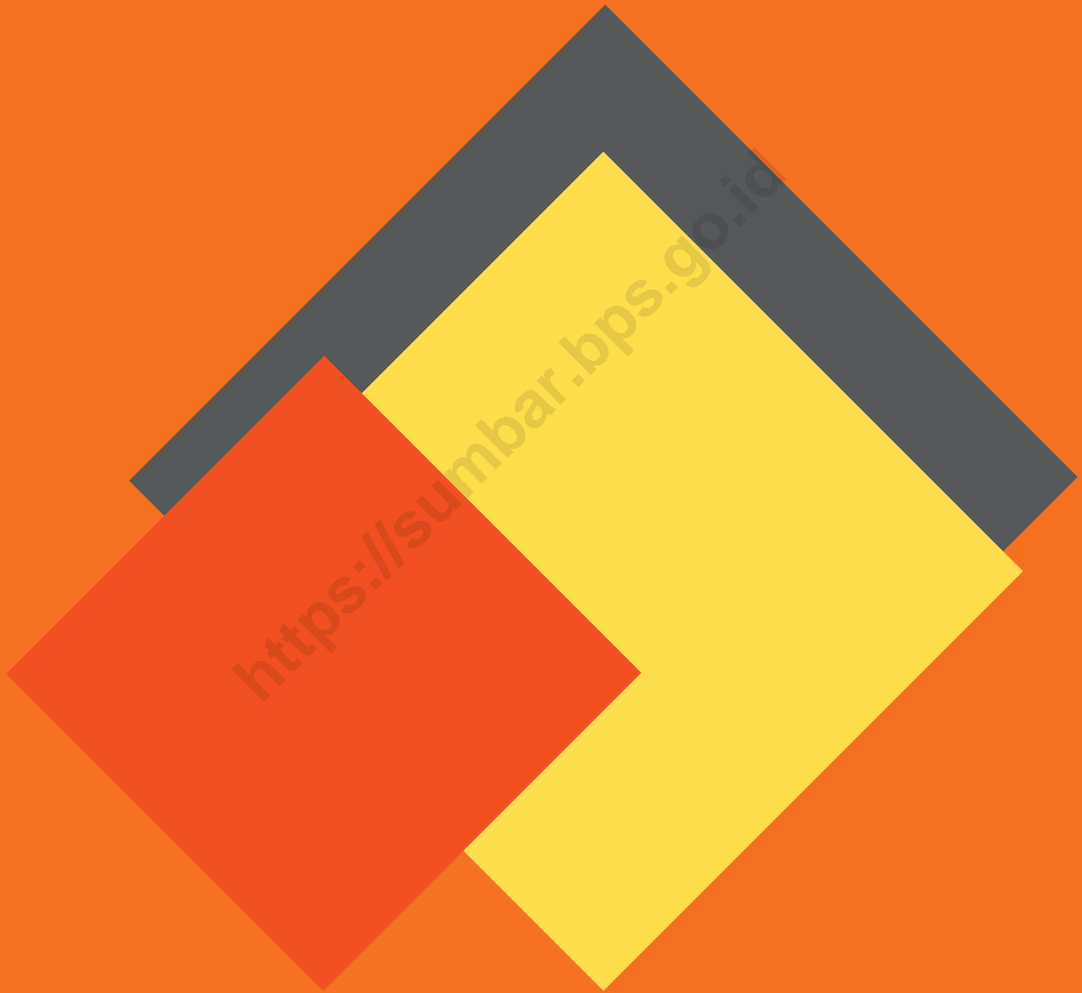
Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya di Provinsi Sumatera Barat. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Padang, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat


Dr. Ir. Sukardi, M.Si



<https://sumbar.bps.go.id>

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI PROVINSI SUMATERA BARAT	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN	17
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	21
PROSPEK DAN KENDALA USAHA	27



Pendahuluan

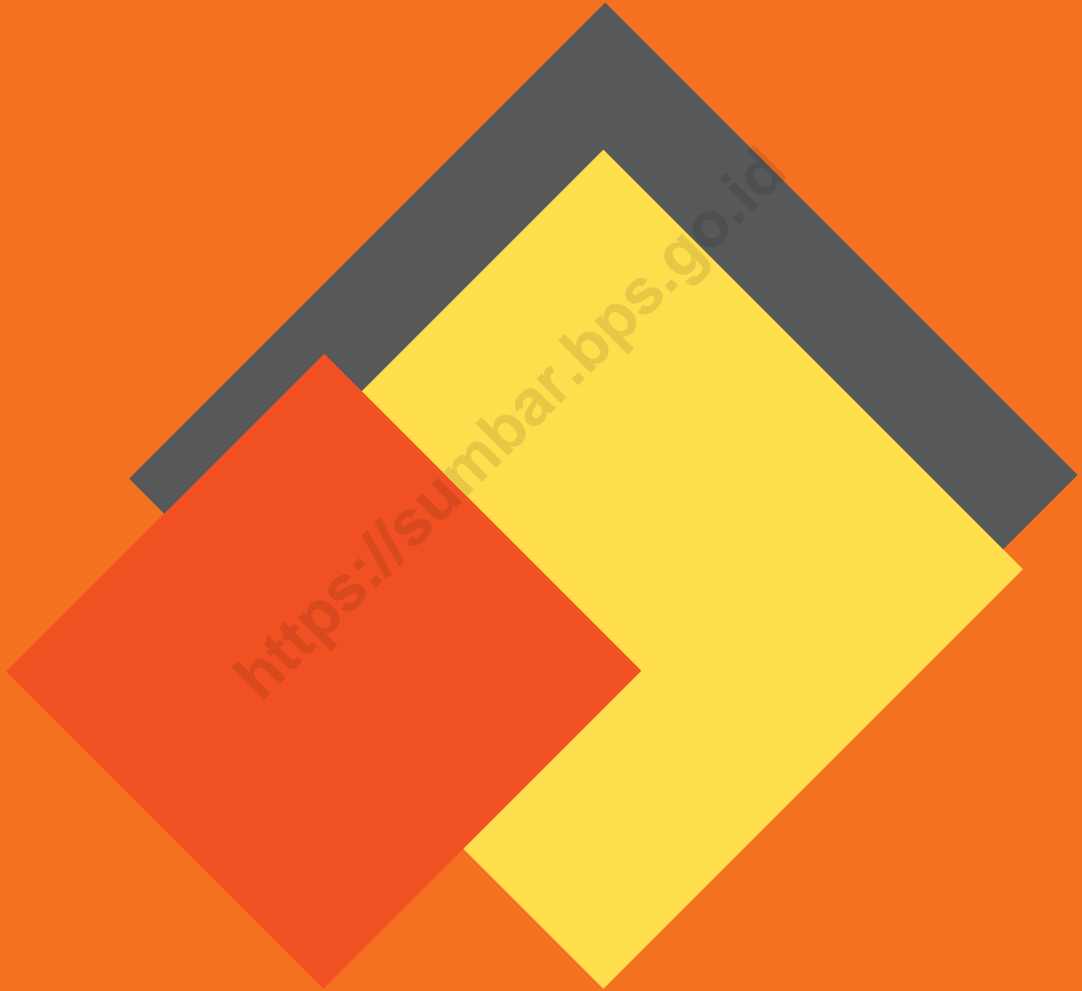
Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 580 ribu usaha atau 98,88 persen dari total usaha nonpertanian di Provinsi Sumatera Barat. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Provinsi Sumatera Barat lebih dari 1,29 juta orang atau sekitar 87,57 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



<https://sumbar.bps.go.id>

UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PROVINSI
SUMATERA BARAT

Bagian

1

<https://sumbar.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

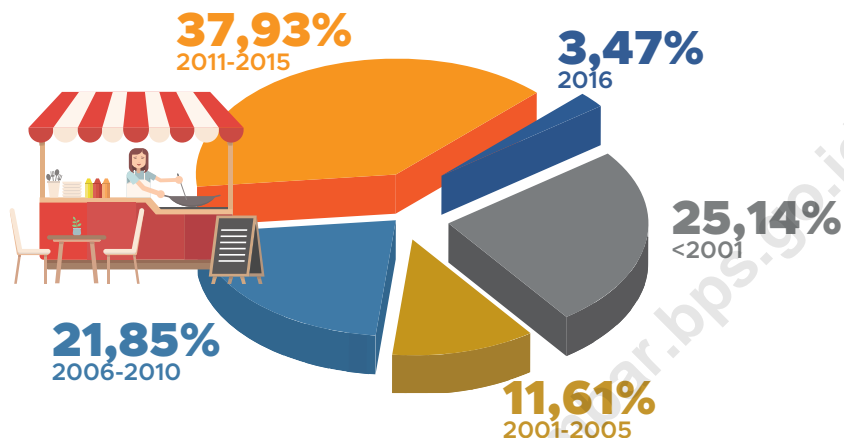
Persentase UMK di Provinsi Sumatera Barat mencapai 98,88 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori Non Pertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 263.676 usaha atau mencapai hampir 45,43 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sebanyak 113.957 usaha dan 87.492 usaha atau 19,64 persen dan 15,08 persen.

Kota Padang sebagai ibu kota, memiliki UMK

terbesar di Provinsi Sumatera Barat yaitu mencapai 89.699 usaha atau lebih dari 15 persen. Sementara Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dua kabupaten dengan jumlah UMK terbesar selanjutnya, masing-masing 56.592 usaha dan 47.549 usaha atau mencapai 9,75 persen dan 8,19 persen.

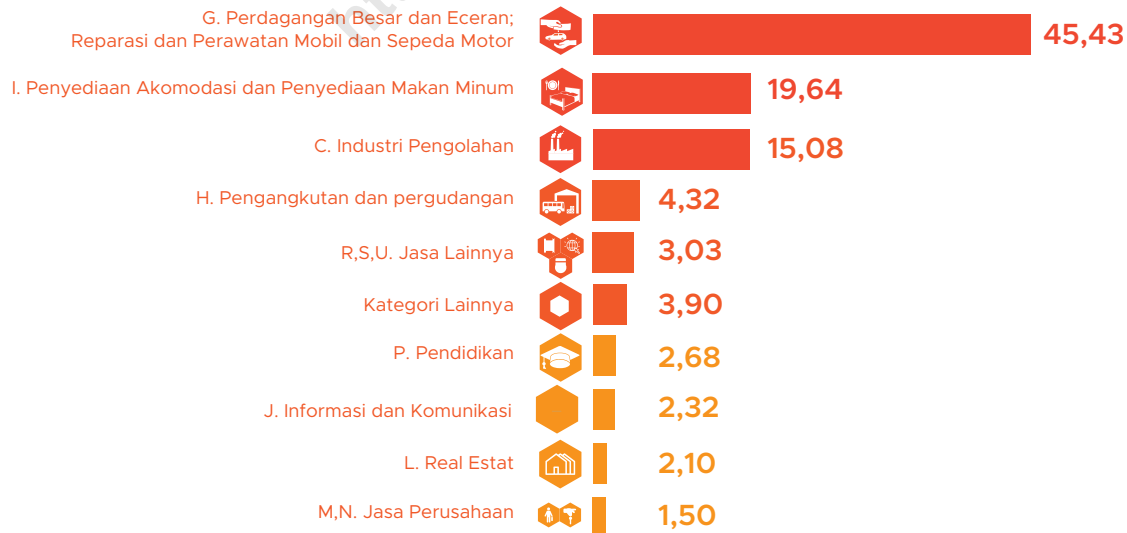
**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Gambar 1.1.
Persentase UMK Menurut Tahun Beroperasi di Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori di Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3
[01] KEPULAUAN MENTAWAI	4 624	0,80
[02] PESISIR SELATAN	42 495	7,32
[03] SOLOK	37 115	6,40
[04] SIJUNJUNG	29 056	5,01
[05] TANAH DATAR	45 137	7,78
[06] PADANG PARIAMAN	43 576	7,51
[07] AGAM	56 592	9,75
[08] LIMA PULUH KOTA	47 549	8,19
[09] PASAMAN	25 981	4,48
[10] SOLOK SELATAN	15 559	2,68
[11] DHARMASRAYA	22 409	3,86
[12] PASAMAN BARAT	38 574	6,65
[71] PADANG	89 699	15,46
[72] KOTA SOLOK	9 843	1,70
[73] SAWAH LUNTO	8 719	1,50
[74] PADANG PANJANG	9 089	1,57
[75] BUKITTINGGI	22 200	3,83
[76] PAYAKUMBUH	18 996	3,27
[77] PARIAMAN	13 131	2,26
Total	580 344	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://sumbar.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Provinsi Sumatera Barat tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, pengangguran di Provinsi Sumatera Barat mencapai lebih dari 5 persen, terbanyak pada lulusan SMA umum yang mencapai lebih dari 9 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMA terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Barat, salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill lulusan SMA khususnya di SMA belum memberikan satu keahlian tertentu. Selain SMA, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMK yang mencapai lebih dari 8 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

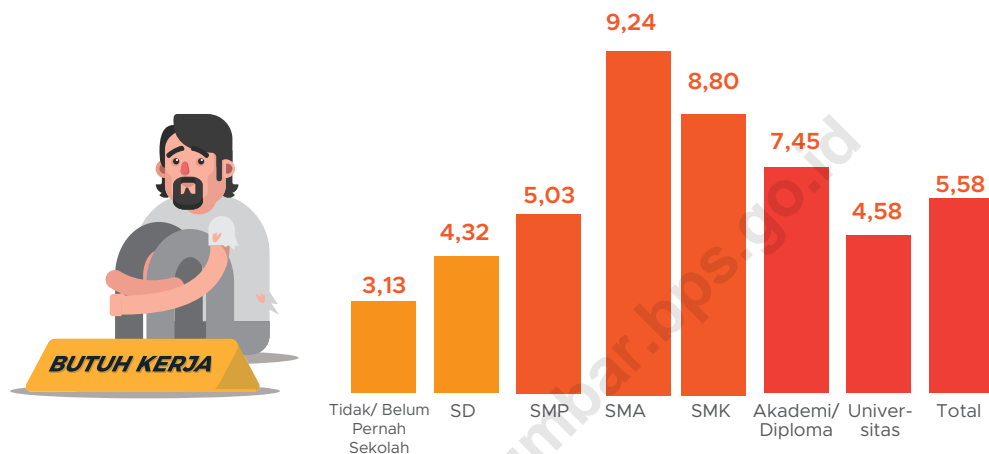
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016 Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja non pertanian di Provinsi Sumatera Barat.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) mencapai lebih dari sepertiga dari tenaga kerja pada UMK secara keseluruhan. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) dan Usaha Industri Pengolahan (kategori C) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK.

Secara-rata-rata per usaha, aktivitas Konstruksi (kategori F) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja per usaha sementara Pendidikan (kategori P) menyerap sekitar 10 pekerja per usaha. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Provinsi Sumatera Barat hanya sebesar 2 pekerja per usaha.

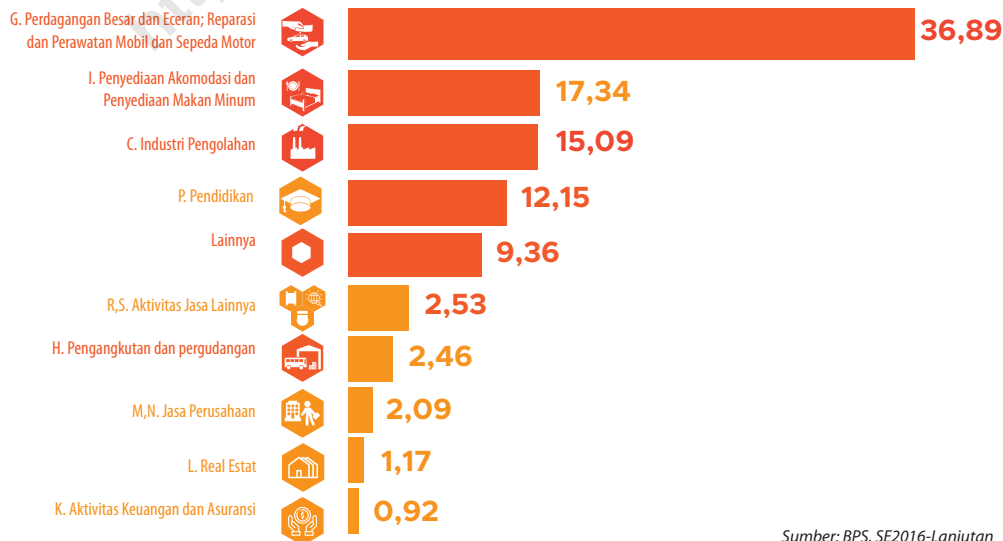
**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.2.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori di Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Provinsi Sumatera Barat, 2017

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
1	2	3	4
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	8 043	14 827	2
C. Industri Pengolahan	87 492	195 786	2
F. Konstruksi	5 497	66 856	12
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	263 676	478 678	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	25 046	31 958	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	113 957	225 027	2
J. Informasi dan Komunikasi	13 442	20 801	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2 710	11 980	4
L. Real Estat	12 190	15 214	1
MN. Jasa perusahaan	8 722	27 136	3
P. Pendidikan	15 551	157 612	10
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6 442	18 951	3
RS. Jasa Lainnya	17 576	32 846	2
Total	580 344	1 297 672	2

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://sumbar.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja yang besar UMK di Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Sumatera Barat, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 92 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan

keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya kurang dari 8 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor Nonpertanian di Sumatera Barat, UMK Aktivitas Pendidikan dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum di
Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer Dalam Usaha di
Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha di
Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan di
Provinsi Sumatera Barat, 2017



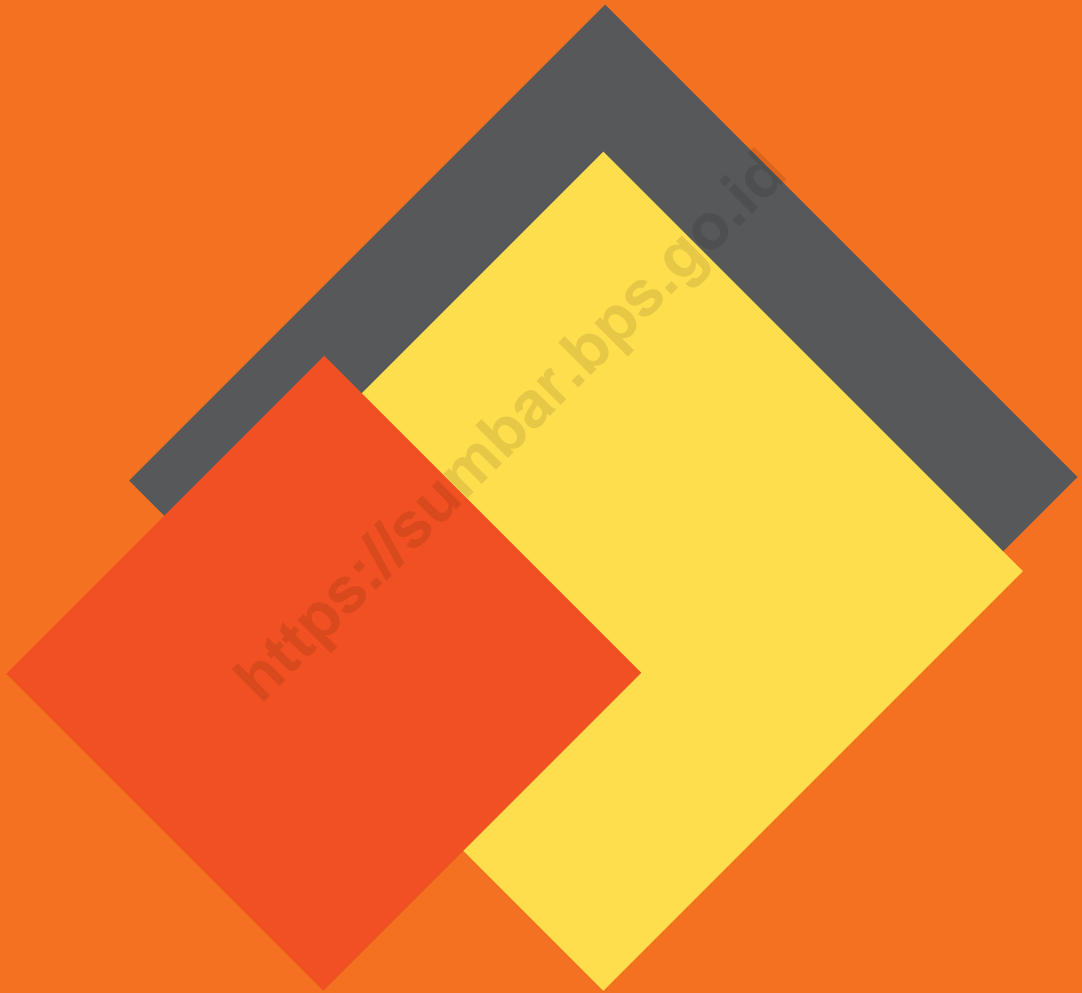
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 3.
 Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan,
 Menggunakan Komputer, dan Menjalinkan Kemitraan di Provinsi Sumatera Barat, 2017

Kategori	Berbadan Hukum	Mempunyai Laporan Keuangan	Menggunakan Komputer	Menjalinkan Kemitraan
1	2	3	4	5
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	3,01	6,74	6,39	5,31
C. Industri Pengolahan	7,16	3,68	6,18	11,51
F. Konstruksi	23,34	21,50	20,63	14,32
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,25	3,10	4,43	7,72
H. Pengangkutan dan Pergudangan	4,17	1,61	2,29	4,78
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,91	0,98	1,86	1,98
J. Informasi dan Komunikasi	5,27	34,60	36,77	10,25
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	58,93	55,13	25,09	15,90
L. Real Estat	1,62	1,03	2,04	0,35
M,N. Jasa perusahaan	15,31	40,40	32,62	15,18
P. Pendidikan	71,73	61,67	51,80	13,40
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	59,66	20,23	22,63	19,22
R,S. Jasa Lainnya	5,67	10,20	12,61	3,99
Total	7,25	6,40	7,21	7,29

Sumber: BPS, SE2016 Lanjutan





**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

Bagian

4

Salah ssatu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yaitu pelaku usaha yang merupakan tenaga kerja. Sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016 Lanjutan menunjukkan sekitar 21 persen UMK dilakukan secara perorangan. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G); Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah (Kategori E), dan Pengangkutan dan Pergudangan (Kategori H).

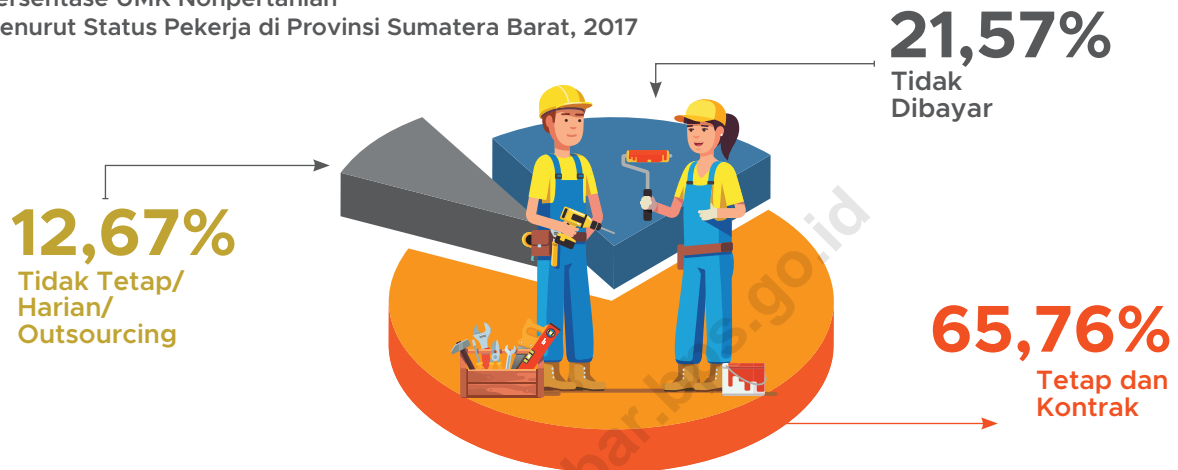
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 51 persen. Persentase ini seakan mematahkan stereotipe bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang

perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK cukup baik. Lebih dari 37 persen pengelola berpendidikan SLTA. Sementara yang berpendidikan perguruan tinggi mencapai 12 persen lebih. Pelaku UMK yang berpendidikan dibawah SLP menjadi kurang dari separuh. Pendidikan pengelola UMK yang cukup baik ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti pelatihan-pelatihan.

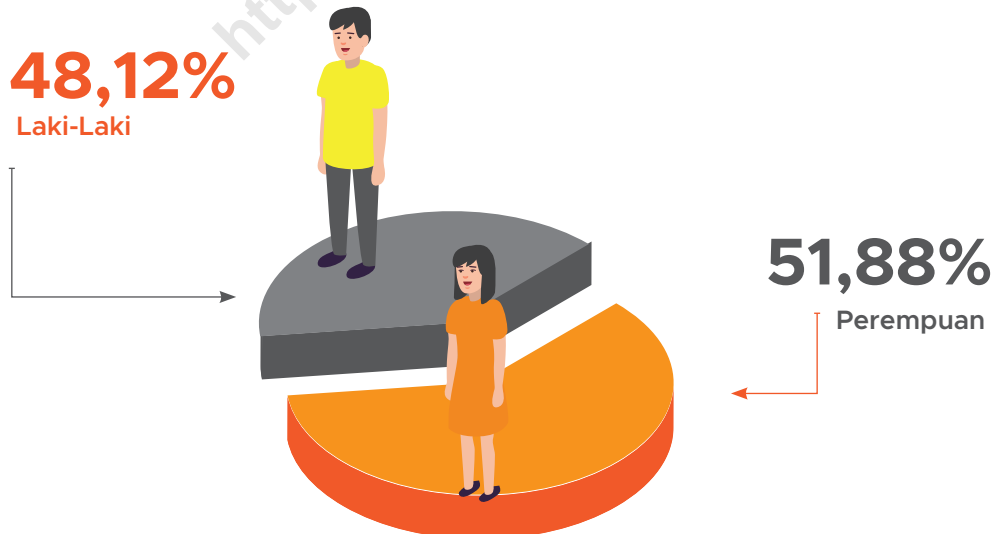
**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian
Menurut Status Pekerja di Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin di Provinsi
Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja di Provinsi Sumatera Barat, 2017

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar	Total
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	53,57	33,16	13,27	100,00
C. Industri Pengolahan	62,18	18,08	19,74	100,00
F. Konstruksi	84,06	5,90	10,04	100,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	60,37	4,93	34,70	100,00
H. Pengangkutan dan Pergudangan	73,41	2,89	23,70	100,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	78,49	2,25	19,27	100,00
J. Informasi dan Komunikasi	81,27	4,32	14,40	100,00
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	58,65	29,00	12,35	100,00
L. Real Estat	90,19	7,96	1,85	100,00
M, N. Jasa Perusahaan	87,63	3,16	9,22	100,00
P. Pendidikan	71,13	16,90	11,97	100,00
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	65,76	12,67	21,57	100,00
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	75,95	13,75	10,31	100,00
Total	62,18	18,08	19,74	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://sumbar.bps.go.id>

Kinerja merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Lebih dari 30 persen pengusaha UMK di Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor UMK secara nasional mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 116 triliun.

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (cost to income) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada infografis dapat terlihat bahwa UMK di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi adalah yang paling profitable di Provinsi Sumatera Barat dengan rasio 0,56. Sektor UMK di provinsi ini mampu mengais keuntungan hingga nyaris dua kali lipat biaya

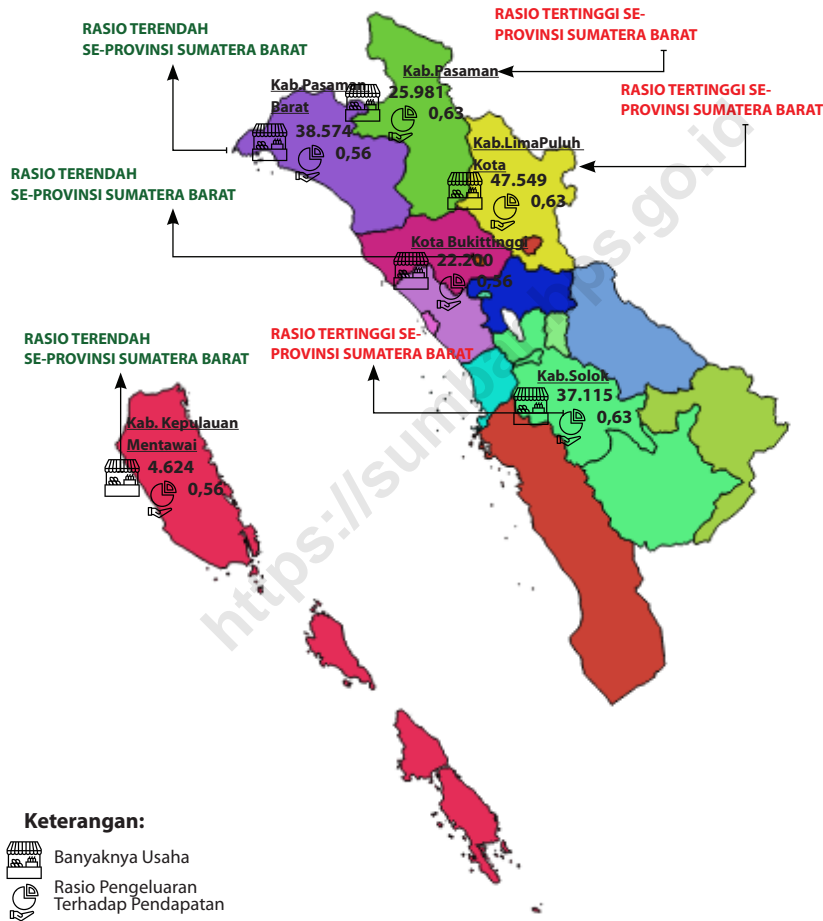
yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman dengan rasio 0,63.

Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, Kategori L (Real Estat) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,21 dan 0,32. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi ada pada Kategori Pendidikan dengan rasio mencapai 0,87.

Namun demikian, Kategori, L, dan G bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Aktivitas Pendidikan (Kategori P) memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu lebih 28 juta per pekerja. Selanjutnya, Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Kategori Q) dan Konstruksi (Kategori F) memberikan balas jasa masing masing lebih dari 24 juta dan lebih dari 18 juta per pekerja.

Tabel. 5.1

Peta Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan Tertinggi dan Terendah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2017



Catatan:

Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menunjukkan tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin menguntungkan atau semakin baik kinerja keuangannya

Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman mempunyai rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi di Sumatera Barat

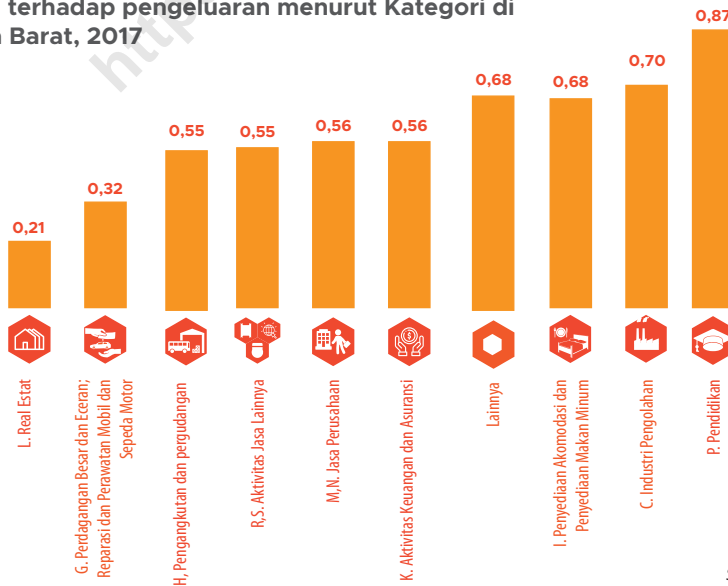
Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kota Bukittinggi mempunyai rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah di Sumatera Barat

Gambar 5.1.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
Rasio Pendapatan terhadap pengeluaran menurut Kategori di Provinsi Sumatera Barat, 2017



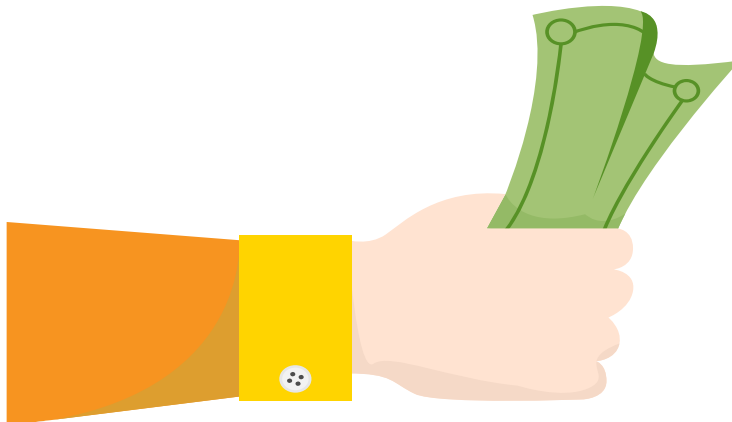
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

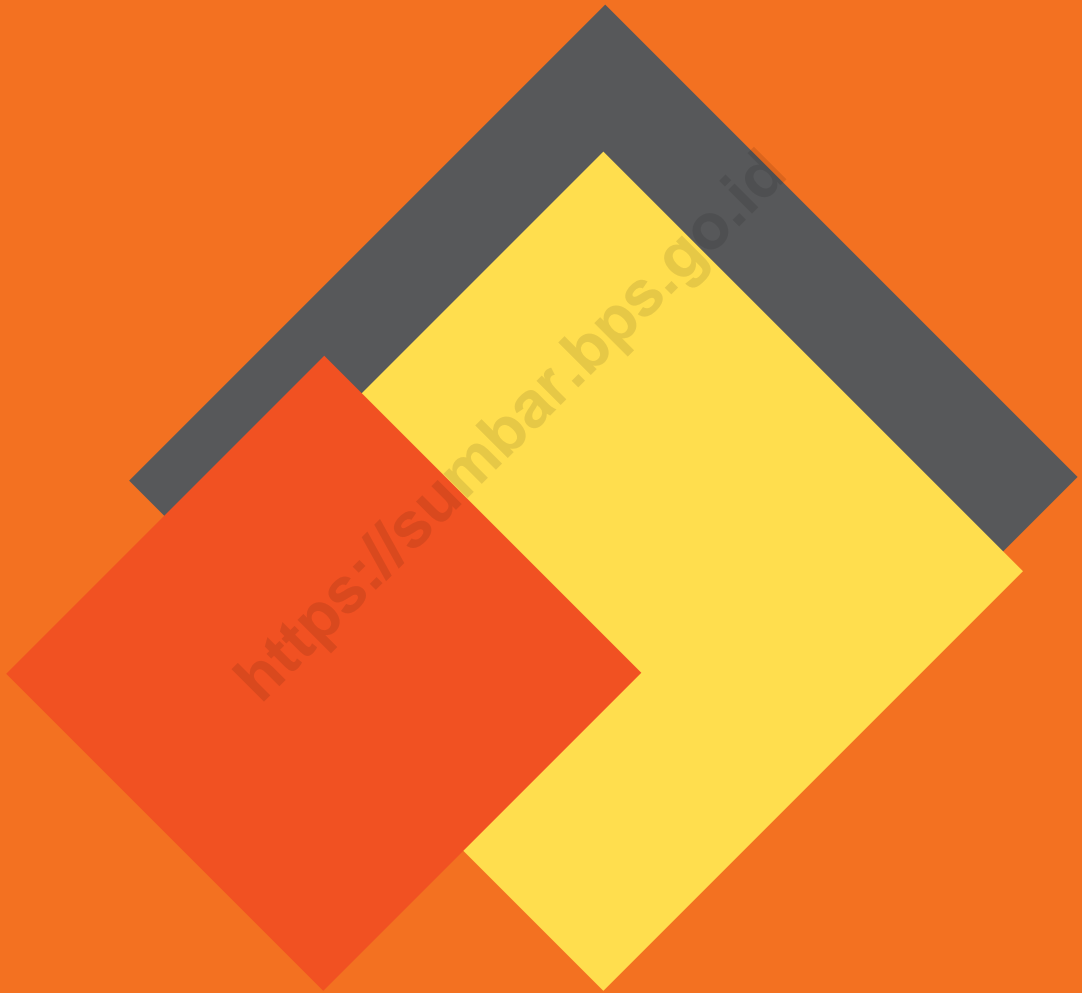
Tabel 5.2.

Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori (Ribu Rupiah) di Provinsi Sumatera Barat, 2017

Kategori	Balas Jasa
1	2
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	15 149
C. Industri Pengolahan	14 175
F. Konstruksi	18 856
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	13 500
H. Pengangkutan dan Pergudangan	18 276
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	13 075
J. Informasi dan Komunikasi	9 226
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	11 388
L. Real Estat	3 877
MN. Jasa perusahaan	13 388
P. Pendidikan	28 918
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	24 461
RS. Jasa Lainnya	12 469
Total	18 631

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





<https://sumbar.bps.go.id>

**PROSPEK
DAN
KENDALA
USAHA**

<https://sumbar.bps.go.id>

Bagian

6

RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 35 persen.

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Provinsi Sumatera Barat 78 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Permasalahan permodalan/likuiditas dan adanya pesaing merupakan kendala utama yang dihadapi. Masing-masing lebih dari 66 persen dan 50 persen pengusaha UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

SPermodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan

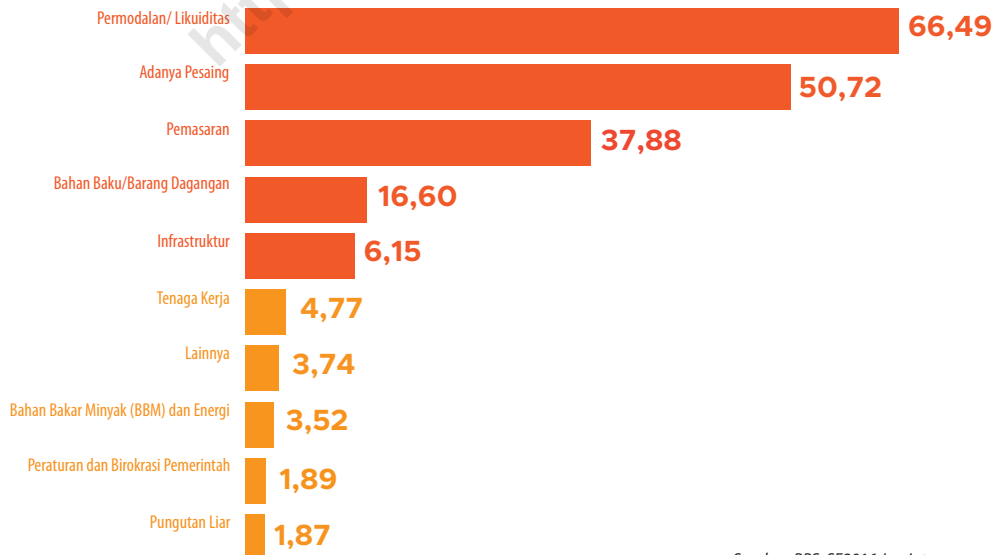
kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMK sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Sumatera Barat telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMK (Peraturan Bank Sumatera Barat Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 13 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan utamanya adalah karena 51 persen karena alasan lainnya. Sedangkan karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, masing masing sekitar 22 persen dan 11 persen.

**PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG**

Gambar 6.1.
 Persentase UMK Menurut Prospek UMK Mendatang di Provinsi Sumatera Barat



Gambar 6.2
 Persentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen) di Provinsi Sumatera Barat, 2017







<https://sumbar.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No.48, Padang 25135
Telp : (0751) 442158, 442159, Fax : (0751) 442160
Homepage : <http://www.sumbar.go.id> E-mail : sumbar@bps.go.id

ISBN 978-602-6544-46-9



9 786026 544469